

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Kota Madiun pada Juli 2021 terjadi inflasi sebesar 0,11 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,27. Kenaikan Indeks Harga Konsumen di Kota Madiun dipicu oleh naiknya harga pada beberapa komoditas yang dominan diantaranya: cabai rawit, tomat, sepeda motor, baja ringan dan wortel. 2. Kota Madiun pada Agustus 2021 terjadi inflasi sebesar 0,15 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,43. Kenaikan Indeks Harga Konsumen di Kota Madiun dipicu oleh naiknya harga pada beberapa komoditas yang dominan diantaranya: jeruk, tomat, jagung manis, pecel, kontrak rumah. 3. Kota Madiun pada September 2021 terjadi deflasi sebesar 0,10 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,32. Penurunan Indeks Harga Konsumen di Kota Madiun dipicu oleh turunnya harga pada beberapa komoditas yang dominan diantaranya: cabai rawit, telur ayam ras, tomat, bawang merah, cabai merah, wortel, bawang putih, ikan bandeng/ikan bolu, pir, dan daun bawang. Sementara komoditas yang mengalami kenaikan harga, antara lain: daging ayam ras, minyak goreng, rokok kretek filter, tarif kereta api, ongkos jahit, jeruk, bayam, pasir, kacang panjang, dan cat tembok.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Penurunan harga komoditas seperti telur ayam ras, cabai rawit, cabai merah, tomat, bawang merah, bawang putih, ikan dan daun bawang disebabkan oleh terjaganya pasokan seiring meningkatnya produksi pada masa panen. 2. Kenaikan harga daging ayam ras seiring dengan meningkatnya permintaan karena restoran, hotel dan destinasi wisata kembali dibuka. 3. Berlanjutnya kenaikan harga rokok yang dipengaruhi oleh kenaikan tarif cukai rokok. Kenaikan tarif cukai membuat pengusaha melakukan penyesuaian harga jual secara bertahap untuk tetap menjaga pangsa pasar. 4. Harga minyak goreng yang terus meningkat disebabkan oleh naiknya harga bahan baku (CPO) di sentra penghasil di wilayah Sumatera. 5. Meningkatnya tarif kereta api disebabkan pelonggaran PPKM pada bulan September. 6. Aktivitas ekonomi dan mobilitas secara umum masih tertahan, sehingga daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kebijakan Pemerintah Kota Madiun untuk melakukan pembelian komoditas yang mengalami penurunan harga, untuk menjaga kestabilan harga jual. Kebijakan ini sejalan dengan program pemberian bantuan social dalam rangka stimulus ekonomi. 2. Monitoring harga untuk memastikan kewajaran harga bahan makanan serta memastikan ketersediaan dan kebutuhan harian masyarakat Kota Madiun. 3. Koordinasi antar anggota TPID untuk menjaga kelancaran pasokan dan ketersediaan pangan. 4. Stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan program peningkatan diversifikasi pertanian dan ketahanan pangan masyarakat. 5. Melakukan sosialisasi gemar makan ikan dengan membagikan paket sembako olahan ikan. 6. Kebijakan pemerintah untuk melakukan pelonggaran kegiatan masyarakat melalui penurunan level PPKM diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. 7. Mewajibkan bagi ASN untuk berbelanja di UMKM sekitar tempat tinggal.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pada bulan September, dari delapan kabupaten/kota penghitung inflasi nasional di Jawa Timur, seluruh kabupaten/kota mengalami deflasi. Kota Madiun mengalami deflasi sebesar

0,10 persen dimana deflasi tertinggi terjadi di Banyuwangi sebesar 0,16 persen dengan IHK 104,62. 2. Peningkatan penyaluran bansos yang mengambil komoditas dari masyarakat lokal berdampak pada meningkatnya permintaan komoditas yang berimplikasi pada meningkatnya tekanan harga komoditas. Hal ini dapat membantu daya beli masyarakat. 3. Program pemulihan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM di masing-masing kelurahan memberikan stimulus untuk pemulihan ekonomi selama masa pandemi di Kota Madiun.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Keterjangkauan Harga dan Ketersediaan Pasokan • Memantau ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan makanan pokok, terutama untuk komoditas yang terindikasi akan mengalami kenaikan harga seperti minyak goreng. • Melakukan pemantauan perkembangan harga komoditas pangan strategis secara harian melalui situs PIHPS maupun Siskaperbapo, untuk monitoring indikasi kenaikan harga komoditas. 2. Ketersediaan Pasokan • Monitoring stok gerai bekerjasama dengan Tim Satgas Pangan dan pengawasan barang beredar dan pemantauan di pasar rakyat dan toko swalayan. • Monitoring ketersediaan stok pangan, baik di Badan Urusan Logistik (BULOG), importir, maupun Gudang lain yang tersedia. 3. Kelancaran Distribusi • Memperluas cakupan Kerjasama dengan daerah sentra produksi untuk memastikan ketersediaan komoditas di Kota Madiun. • Operasi pasar (OP) di sejumlah wilayah Kota Madiun untuk mengantisipasi harga komoditas-komoditas yang melonjak. 4. Komunikasi Efektif • Melakukan komunikasi dan himbauan kepada masyarakat agar menjaga aktivitas dan transaksi ekonomi di pasar berjalan dengan normal. • Rapat Evaluasi terkait pelaksanaan pengendalian inflasi di Kota Madiun.